KEWENANGAN KEPALA SPBT TNI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN BBM DI LINGKUNGAN TNI

Arif Hidayat Efri^{1*}, Benni Rusli²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

*Correspondence: ayip0305@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 27.12.2024

Direvisi: 22.04.2025

Disetujui: 22.04.2025

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2025

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) dalam pengelolaan dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) serta pelumas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepala SPBT TNI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sarana dan prasarana BMP sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2019. Tanggung jawab ini meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, pengawasan operasional, pemeliharaan fasilitas, serta penyusunan laporan dan evaluasi kinerja. Namun, terdapat tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan masalah teknis yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional. Untuk itu, solusi berupa peningkatan kapasitas personel, modernisasi fasilitas, serta kerja sama lintas instansi diperlukan guna memastikan pengelolaan logistik yang efisien dan sesuai dengan regulasi.

Kata Kunci: kepala spbt TNI, pengelolaan bahan bakar, pengawasan operasional

ABSTRACT

This study discusses the responsibilities of the Head of the Indonesian National Armed Forces Fuel Filling Station (SPBT TNI) in managing and supervising fuel and lubricants within the Indonesian National Armed Forces (TNI). The Head of SPBT TNI plays a strategic role in ensuring the management of fuel and lubricant facilities complies with the standards stipulated in the Minister of Defense Regulation Number 8 of 2019. These responsibilities include managing facilities and infrastructure, overseeing operations, maintaining facilities, and preparing performance reports and evaluations. However, challenges such as limited human resources, technology, and technical issues can affect operational efficiency. Therefore, solutions such as personnel capacity building, facility modernization, and inter-agency collaboration are needed to ensure efficient and regulation-compliant logistics management.

Keywords: head of spbt TNI, fuel management, operational supervision

1. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah salah satu elemen penting negara yang berakar dari rakyat, berjuang di tengah masyarakat, dan berdedikasi untuk melayani kepentingan rakyat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Awalnya, organisasi ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian berganti menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan akhirnya berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1947. Dalam sejarahnya, TNI pernah bergabung dengan Kepolisian dalam satu entitas yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, melalui reformasi pada tahun 2000, TNI dan Polri dipisahkan, sehingga TNI kembali berfokus pada fungsi pertahanan, sedangkan Polri bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Pembentukan TNI memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari pengaruh pelatihan militer oleh Belanda melalui KNIL dan Jepang melalui PETA selama masa pendudukan. Pasukan PETA yang dilatih Jepang menjadi dasar pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah kemerdekaan Indonesia. Perubahan struktur terus terjadi hingga pada tahun 1947, TNI lahir dari penyatuan berbagai barisan bersenjata di

Indonesia. Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari TNI untuk memperingati peran penting institusi ini dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Selama periode Orde Baru, TNI, yang saat itu masih tergabung dalam ABRI, memiliki peran ganda melalui konsep Dwifungsi ABRI, yakni di bidang pertahanan dan politik. Dalam praktiknya, banyak personel militer yang ditempatkan dalam posisi pemerintahan dan lembaga legislatif. Namun, setelah reformasi, konsep ini dihapus, dan TNI fokus pada operasi militer untuk perang serta operasi militer selain perang, seperti penanggulangan bencana, misi perdamaian dunia, dan pengamanan objek vital nasional. Reformasi TNI juga melibatkan pembaruan regulasi dan pengelolaan organisasi. Pada tahun 2009, dikeluarkan kebijakan untuk mengambil alih aktivitas bisnis yang sebelumnya dikelola TNI agar fokus pada tugas utamanya sebagai penjaga pertahanan negara. TNI terus terlibat dalam misi perdamaian internasional melalui Kontingen Garuda dan memperkuat hubungan militer dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, yang memulihkan kerja sama militer setelah embargo senjata dicabut pada tahun 2005.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) Tepbek I-44-05-A/B Tinggi Bekangdam I-BB adalah satuan di bawah Kendali Pembekalan dan Angkutan (Bekangdam) Kodam I/Bukit Barisan yang bertugas mengelola pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian bahan bakar serta pelumas untuk mendukung operasional militer TNI. Satuan ini berperan strategis dalam menjamin ketersediaan logistik energi bagi kendaraan, alat berat, dan peralatan lainnya, sesuai kebutuhan operasional TNI, baik dalam kegiatan rutin maupun misi khusus. Dengan berlandaskan peraturan hukum yang berlaku, SPBT TNI ini mengutamakan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam tata kelola bahan bakar, sehingga mendukung efektivitas operasi militer di wilayah tanggung jawab Kodam I/Bukit Barisan. Dalam melaksanakan operasional hariannya, Sebuah SPBT TNI harus melaksanakan disiplin militer. Disiplin militer atau prajurit TNI adalah elemen fundamental dalam institusi militer untuk membangun citra positif di mata atasan dan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kedisiplinan menjadi kewajiban utama bagi setiap prajurit, yang harus senantiasa menghindari segala bentuk tindakan, sekecil apa pun, yang bertentangan dengan aturan atau nilai-nilai militer.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tanggung jawab hukum Kepala SPBT TNI dalam pengelolaan dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini dilakukan untuk memahami tanggung jawab Kepala SPBT TNI dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan BBM di lingkungan TNI agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat pentingnya BBM sebagai komponen vital dalam mendukung kegiatan operasional TNI. Kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya dapat berdampak langsung pada kemampuan pertahanan negara. Selain itu, pengelolaan BBM sering kali dihadapkan pada risiko penyimpangan, baik dalam distribusi, alokasi, maupun pengawasannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi celah hukum yang dapat meminimalkan risiko tersebut. Kepastian hukum juga menjadi alasan utama penelitian ini, mengingat Kepala SPBT TNI memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan BBM. Penting untuk memastikan bahwa tugas dan wewenang tersebut dijalankan sesuai dengan regulasi yang jelas dan diawasi dengan mekanisme yang memadai. Lebih jauh, penelitian ini mendukung reformasi sektor pertahanan yang menuntut pengelolaan sumber daya, termasuk BBM, dilakukan secara profesional dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mendorong peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme aparat pengelola BBM di lingkungan TNI.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab Kepala SPBT TNI dalam pengelolaan dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan TNI. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Secara deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci berbagai peraturan yang mengatur tanggung jawab Kepala SPBT TNI. Secara analitis, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan tersebut dalam praktik, termasuk pelaksanaan tanggung jawab dan pengawasannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat kajian. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis peraturan yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab dan pengelolaan BBM, pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelusuri latar belakang penyusunan peraturan, serta pendekatan analisis kasus (*case approach*) untuk mengkaji penerapan tanggung jawab Kepala SPBT TNI melalui studi kasus tertentu. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek hukum yang mengatur tanggung jawab Kepala SPBT TNI serta menawarkan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan BBM di lingkungan TNI.

3. Hasil dan Pembahasan

Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) adalah pejabat TNI yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian operasional penyimpanan serta distribusi bahan bakar minyak dan pelumas untuk mendukung kebutuhan logistik dan operasional militer di lingkungan Bekangdam I-Bukit Barisan. Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI memiliki tanggung jawab hukum yang diatur secara hirarkis melalui aturan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standar Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1225);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Bahan Bakar Minyak Dan Pelumas Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Bahan Bakar Minyak Dan Pelumas Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Pasal 15, kepala satuan kerja atau sub-satuan kerja diwajibkan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana BMP di lingkungan kerjanya. Dalam hal ini, Kepala SPBT TNI bertanggung jawab memastikan bahwa fasilitas, distribusi, dan manajemen bahan bakar serta pelumas di unitnya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan. Selain itu, komandan atau kepala satuan di lingkungan TNI secara hirarkis juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serupa. Untuk menjamin akurasi dan efektivitas pengawasan tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada kepala satuan kerja untuk bekerja sama dengan instansi teknis terkait guna mendukung penyelenggaraan sarana dan prasarana BMP.

Sesuai Pasal 16, pengawasan dan pengendalian yang terkait dengan program kerja dan anggaran dalam penyelenggaraan standar sarana dan prasarana BMP berada di bawah pengawasan instansi seperti Inspektorat Kementerian Pertahanan, Inspektorat Markas Besar TNI, serta Inspektorat Markas Besar Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Hal ini menegaskan adanya mekanisme pengawasan berlapis untuk memastikan bahwa standar pengelolaan BMP tidak hanya terpenuhi tetapi juga diawasi secara konsisten oleh lembaga-lembaga terkait. BMP sendiri, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang, mencakup hasil olahan minyak bumi atau nabati yang digunakan untuk bahan bakar, pelumas, dan pemeliharaan alat atau mesin. Oleh karena itu, Kepala SPBT TNI memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan penyimpanan, distribusi, dan penggunaan BMP berlangsung aman, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang mendukung kesiapan alutsista dan operasional militer.

Dalam mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) memiliki beberapa teori dasar yaitu :

1. Teori Hukum Administrasi Negara
Hukum administrasi negara berperan sebagai landasan bagi pengelolaan barang milik negara (BMN) yang mencakup bahan bakar militer. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menekankan bahwa setiap unit TNI, termasuk SPBT TNI, harus dikelola sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam pengelolaan SPBT TNI, kepala stasiun bertanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan distribusi bahan bakar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Teori Manajemen Logistik Militer
Manajemen logistik militer merupakan elemen vital dalam mendukung keberhasilan operasi militer, baik dalam situasi tempur maupun non-tempur. Logistik militer secara umum mencakup serangkaian proses yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengendalian material. Material ini mencakup berbagai kebutuhan militer, salah satunya adalah bahan bakar, yang memiliki peran strategis dalam memastikan mobilitas dan daya dukung operasional angkatan bersenjata. Dalam konteks Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI), manajemen logistik militer berfokus pada optimalisasi pasokan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan operasional secara tepat waktu, aman, dan efisien. Optimalisasi ini mencakup pengelolaan stok bahan bakar di fasilitas penyimpanan, perencanaan jadwal distribusi ke satuan-satuan pengguna, dan pengawasan pelaksanaan distribusi untuk meminimalkan potensi

kebocoran atau penyimpangan. Hal ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga administrasi, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan logistik.

3. **Teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen utama dan pengendali dalam mencapai tujuan organisasi. Potensi SDM, termasuk waktu, tenaga, daya pikir, dan daya fisik, harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberhasilan organisasi. Tanpa SDM yang mampu mengelola modal, teknologi, dan sumber daya lainnya, pencapaian tujuan organisasi tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, peran SDM sangat krusial dalam pembangunan dan keberhasilan organisasi. SDM yang terlatih dan terampil menjadi cikal bakal terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja. (Hariyanto, 2023). Kegiatan di SPBT TNI melibatkan risiko tinggi, seperti kebakaran, tumpahan bahan bakar, dan kontaminasi lingkungan. Oleh karena itu, penerapan teori K3 sangat penting untuk meminimalkan risiko. Prinsip-prinsip keselamatan berbasis regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menjadi acuan utama untuk memastikan bahwa fasilitas, personel, dan prosedur operasional di SPBT TNI memenuhi standar keselamatan.
4. **Teori Sistem Dukungan & Informasi Logistik Sistem**
Konsep dukungan logistik terpadu dapat dikaitkan dengan teori manajemen logistik. Dalam konteks pertahanan, logistik telah berkembang menjadi *Integrated Logistic Support (ILS)* atau Dukungan Logistik Terpadu (DLT). Menurut Blanchard, DLT mencakup semua elemen dukungan yang diperlukan untuk memastikan efisiensi dan nilai ekonomi suatu sistem atau peralatan, dengan mempertimbangkan setiap tingkat pemeliharaan sepanjang siklus hidup yang telah direncanakan. (Blanchard, 1997) Informasi logistik mendukung pengelolaan data bahan bakar, termasuk penghitungan stok, pengawasan distribusi, dan pelaporan. Dalam SPBT TNI, sistem ini digunakan untuk memastikan akurasi data dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan bahan bakar. Digitalisasi sistem logistik yang terintegrasi membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan.
5. **Teori Akuntabilitas Publik**
Akuntabilitas merupakan isu utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang lebih dikenal sebagai *Good Government Governance*. Dalam praktiknya, akuntabilitas diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban yang mencakup program kegiatan, pencapaian kinerja, evaluasi, serta analisis terhadap hasil yang telah dicapai.¹ Sebagai bagian dari institusi militer yang menggunakan anggaran negara, SPBT TNI harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas publik. Hal ini melibatkan pelaporan secara berkala, pengawasan oleh pihak terkait, dan audit eksternal terhadap penggunaan sumber daya (Aprilia, 2023).
6. **Teori Lingkungan dan Pengelolaan Limbah**
Limbah harus di kelola dengan baik.²Teori ini mendasari pengelolaan limbah bahan bakar di SPBT TNI untuk mematuhi peraturan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan tanggung jawab SPBT TNI dalam menangani limbah cair atau gas yang dapat mencemari lingkungan.

Wewenang Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI

Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) memegang tanggung jawab penting dalam memastikan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 15 dan 16 Tanggung Jawab Kepala SPBT TNI Meliputi:

1. **Pengelolaan Sarana dan Prasarana**
Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas. Tugas ini mencakup memastikan bahwa fasilitas penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan BBM serta pelumas dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini melibatkan penerapan prosedur operasional yang memenuhi kriteria keamanan, keselamatan, dan efisiensi, sehingga mendukung keberlangsungan operasional dan logistik di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, Kepala SPBT TNI juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut selalu dalam kondisi optimal melalui pemeliharaan rutin dan pengawasan ketat terhadap penggunaannya. Dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait, kepala SPBT TNI dapat mengintegrasikan berbagai elemen pendukung, termasuk teknologi dan sumber daya manusia, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BBM serta pelumas. Akuntabilitas ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga menjamin kesiapan logistik untuk mendukung keberhasilan operasional pertahanan negara.
2. **Pengawasan Operasional**
Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan operasional, yang meliputi proses penyimpanan, distribusi, dan penggunaan bahan bakar serta pelumas di lingkungan

Kementerian Pertahanan dan TNI. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, guna mencegah penyimpangan, kerugian, atau potensi bahaya yang dapat mengganggu kelancaran operasional militer. Dalam hal penyimpanan, Kepala SPBT TNI harus memastikan bahwa fasilitas penyimpanan BBM dan pelumas aman dari risiko kebakaran, kebocoran, atau kerusakan lainnya. Selain itu, pengawasan distribusi dan penggunaan BBM dilakukan untuk memastikan alokasi yang tepat, efisiensi pemakaian, serta ketersediaan yang cukup sesuai kebutuhan operasional. Hal ini mencakup pemantauan terhadap rantai pasok logistik, mulai dari pengiriman hingga penerimaan di unit pengguna. Kepala SPBT TNI juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi kendala, seperti keterlambatan distribusi atau penyalahgunaan sumber daya, dan mengambil langkah perbaikan yang tepat. Melalui pengawasan yang efektif, Kepala SPBT TNI berkontribusi langsung pada keberlangsungan operasional dan kesiapan logistik militer secara menyeluruh.

3. Penyelenggaraan Standar Keamanan

Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas dilakukan dengan mematuhi standar keamanan dan keselamatan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup penerapan prosedur keamanan yang ketat dalam setiap tahap operasional, mulai dari penyimpanan hingga distribusi. Kepala SPBT TNI harus memastikan bahwa fasilitas penyimpanan, seperti tangki dan sistem perpipaan, memenuhi persyaratan teknis untuk mencegah kebakaran, kebocoran, atau insiden lain yang dapat mengancam keselamatan personel maupun aset strategis.

Selain itu, Kepala SPBT TNI wajib menerapkan program pelatihan dan simulasi bagi personel untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi potensi risiko. Evaluasi rutin terhadap kondisi fasilitas serta kepatuhan terhadap regulasi keselamatan juga menjadi bagian penting dari tugas ini. Dengan menerapkan standar keamanan yang tinggi, Kepala SPBT TNI tidak hanya memastikan perlindungan terhadap sumber daya BBM dan pelumas, tetapi juga mendukung kelancaran operasional militer yang bergantung pada keberlanjutan logistik yang aman dan andal.

4. Pemeliharaan Sarana

Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk memastikan semua sistem berjalan dengan optimal. Pemeliharaan ini mencakup pemeriksaan berkala terhadap tangki penyimpanan, sistem perpipaan, pompa distribusi, dan peralatan pendukung lainnya. Langkah ini penting untuk mencegah kerusakan yang dapat menghambat kelancaran operasional logistik militer. Dengan memastikan bahwa fasilitas selalu dalam kondisi baik, risiko kebocoran, korosi, atau kerusakan teknis lainnya dapat diminimalkan, sehingga keberlanjutan distribusi BBM terjamin. Selain itu, Kepala SPBT TNI juga bertugas mengidentifikasi potensi masalah teknis sebelum menjadi kerusakan yang lebih serius. Pemeliharaan tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi gangguan, tetapi juga proaktif melalui program perawatan preventif yang terjadwal. Dalam pelaksanaannya, diperlukan kerja sama dengan tenaga teknis yang kompeten serta penggunaan alat inspeksi modern untuk memastikan akurasi dan efisiensi. Pemeliharaan yang terorganisasi dengan baik tidak hanya meningkatkan daya guna fasilitas tetapi juga mendukung kesiapan operasional TNI yang sangat bergantung pada kelancaran logistik BBM.

5. Pelaporan dan Evaluasi

Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) bertanggung jawab untuk menyusun laporan berkala yang mencakup kinerja sarana dan prasarana bahan bakar minyak (BBM) serta pelumas. Laporan ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat detail operasional, termasuk distribusi, penggunaan, dan pemeliharaan fasilitas BBM. Penyusunan laporan tidak hanya memuat data kuantitatif tetapi juga analisis terhadap berbagai aspek operasional, seperti efisiensi logistik, keandalan sistem, dan pemenuhan standar keamanan. Dengan adanya laporan yang sistematis, pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan dapat didukung oleh informasi yang akurat dan relevan. Selain menyusun laporan, Kepala SPBT TNI juga bertugas melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi operasional sarana BBM secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem operasional serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Proses evaluasi mencakup penilaian terhadap penggunaan sumber daya, tingkat kerusakan fasilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja yang lebih efektif ke depannya, sehingga mendukung keberlanjutan dan kesiapan logistik pertahanan secara optimal.

4. Kesimpulan

Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) memainkan peran strategis dalam memastikan kelancaran logistik militer melalui pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala SPBT TNI bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan standar keamanan, pelaporan, serta evaluasi. Semua tanggung jawab tersebut harus dijalankan sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2019. Kepala SPBT TNI juga harus memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan akuntabilitas publik, mengintegrasikan teori administrasi negara, manajemen logistik militer, dan teori K3 dalam operasional sehari-hari.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas Kepala SPBT TNI dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian BBM, disarankan agar pengelolaan dilakukan melalui penerapan sistem berbasis teknologi

informasi yang terintegrasi untuk memantau distribusi dan penggunaan BBM secara real-time. Selain itu, pelatihan berkelanjutan terkait manajemen logistik militer, standar keamanan, serta teori K3 perlu diperkuat guna meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial. Penguatan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta pembentukan mekanisme evaluasi berkala yang independen, juga menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku:

- Blanchard, B. S. (2004). *Integrated Logistics Support Handbook* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Mahfud, M. D. (2018). *Teori Administrasi Negara: Hukum Administrasi dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, D. (2017). *Manajemen Logistik Militer: Konsep dan Penerapan dalam Operasi Pertahanan*. Jakarta: Penerbit Logistik.

Jurnal:

- Arief, S. (2020). "Peningkatan Efisiensi Distribusi Logistik Militer melalui Teknologi Digital." *Jurnal Logistik Pertahanan*, 5(2), 134-146.
- Nurhadi, R. (2019). "Analisis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI." *Jurnal Keamanan dan Pertahanan*, 11(3), 202-215.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan